

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

DINAS SOSIAL

Alamat Jln. Buano No 04. Kota Masohi
Email : dinassosialkabmalteng@gmail.com

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)**



TAHUN 2025

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban instansi tersebut untuk menjelaskan tingkat capaian kinerjanya. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan untuk menemukan kelemahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, melainkan sebagai upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan instansi pemerintah serta fungsi pengawasan.

Pada Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah telah melaksanakan dengan baik tugas dan fungsi yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah hal ini Nampak dari capaian 2 (dua) sasaran strategi kinerja yang ditetapkan seluruhnya telah berhasil dicapai dengan baik. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategi tersebut dapat dilihat melalui keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran sebagaimana yang dituangkan dalam formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Walaupun seluruh sasaran strategi yang ditargetkan telah dapat dicapai namun capaian sasaran tersebut baru menggambarkan hasil langsung dari kegiatan. Hal ini terutama disebabkan sistem pengumpulan data kinerja dari indikator *outcome*. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dalam tahun mendatang Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah akan berupaya mengembangkan dan meningkatkan sistem pengumpulan data kinerja sehingga dapat menyajikan data kinerja dari indikator *outcome*.

Selain pencapaian sasaran strategi, akuntabilitas keuangan juga disajikan sebagai ukuran efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi dalam bentuk dana yang bersumber dari pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

Penyajian Akuntabilitas Keuangan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

DINAS SOSIAL

Jln Buano Nomor 4 Telp. (0914) 21032 Fax 22370 Kode Pos 97511

MASOHI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patutlah kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan Rahmat dan KaruniahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan penyusunanya.

LKjIP Tahun 2025 disusun dalam rangka pelaksanaan amanat Instruksi Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kerja , Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah. Pelaporan Kinerja ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati dan Masyarakat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan dalam meningkatkan kinerja di masa-masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah, yang disusun ini masih jauh dari kesempurnaan , untuk itu masukan dan saran dalam rangka penyempurnaan LKjIP ini sangat diharapkan dari semua unsur baik dari Dinas Sosial maupun unsure lainnya. LKjIP ini, diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan masalah sosial di masa yang akan datang .

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Semoga semua dukungan dan support atas terselesainya LKjIP ini akan mendapat balasan oleh Allah SWT.

Masohi, Januari 2026



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 ,Latar Belakang	1
1.2.Tugas Pokok dan Fungsi	1-6
1.3. Penentuan isu-isu strategis	6
1.4. Permasalahan	6-7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategi	8
2.2. Indikator Kinerja Utama	10
2.3. Perjanjian Kinerja	10-12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024	13
3.2. Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun Sebelumnya	14
3.3. Perbandingan capaian kinerja dengan capaian kinerja instansi lainya	15
3.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atas peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	15-17
3.5. Realisasi Anggaran	18-22
3.6. Efisiensi anggaran	22
BAB IV PENUTUP	23

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik yang bersih, transparan dan akuntabel serta berdaya guna dan berhasil guna, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah, maka setiap Institusi pemerintah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansinya melalui mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun berjalan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik dan bersih, maka Dinas Sosial sebagai unsur Pembantu Bupati di bidang Sosial , dituntut agar selalu meningkatkan kinerjanya dengan melakukan perbaikan dan pembenahan kinerjanya. Perbaikan dan pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan fungsi dan peran Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan di bidang Sosial secara baik dan optimal kepada masyarakat.

Terwujudnya suatu tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih , transparan dan akuntabel merupakan harapan semua pihak, berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dalam penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur serta memiliki legitimasi hukum yang jelas sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan bersinergi satu dengan yang lainnya serta berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan dapat dipertanggung jawabkan serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sejalan dengan pelaksanaan UU nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, maka Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang mencerminkan pencapaian kinerja Visi, Misi, realisasi pencapaian indicator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

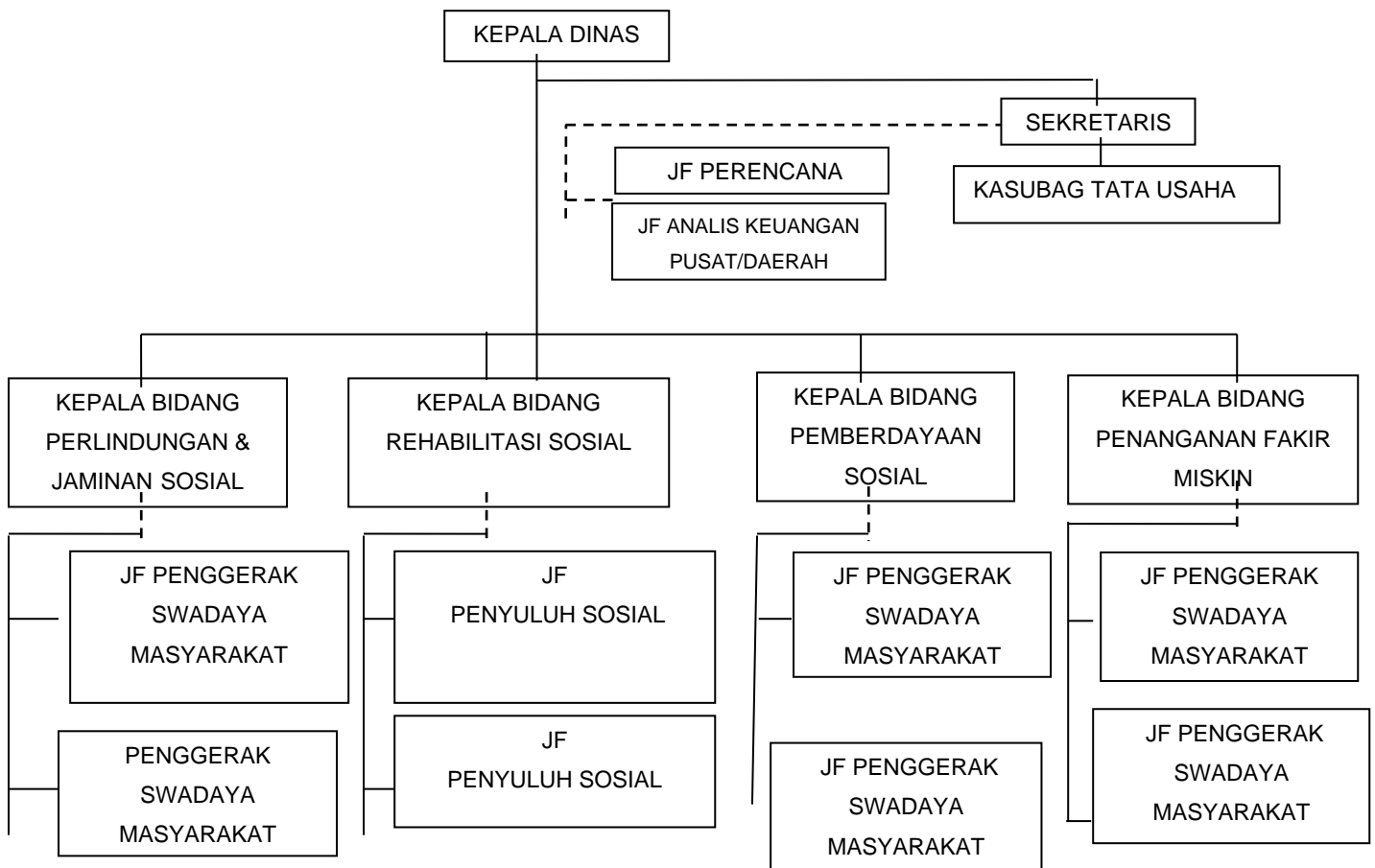
Sesuai Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah, maka tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang social dan tugas Pembantuan yang diberikan kepada Bupati Maluku Tengah.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan di bidang Sosaial.
- b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Sosial.
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibiadang Sosial.
- d. Pelaksanaan Administrasi bidanmg Sosial.
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1. Organisasi

Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah di bantu oleh Pejabat Struktural Eselelon III dan Pejabat fungsional /eselon IV, yang diuraikan dalam Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah sebagai berikut :



Jabatan Struktural sebagaimana tersebut diatas di klasifikasi sesuai jenjang Eselon sebagai berikut :

1. Kepala Dinas (Eselon II/b). 1 Orang
2. Sekretaris (Eselon III/a), 1 orang.
3. Kepala Bidang (Eselon III/b) 4 orang ,
4. Pejabat Fungsional / (Eselon IV/a), sebanyak 9 orang.

2. Lingkungan Strategis

2.1). Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah per 31 Desember 2025, sebanyak 32 orang dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1. Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	2 Orang
2.	Sarjana (S1)	28 Orang
3.	Sarjana Muda (D3)	1 Orang
4.	SMU / Sederajat	5 Orang
5.	SMP	
Jumlah		35 Orang

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Jumlah pegawai yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah per 31 Desember 2025 sebanyak 35 orang.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Kedudukan				Jumlah
		Esselon II	Esselon III	Fungsional/Eselon IV	Staf	
1.	Strata 2	2 orang	1 orang	-	-	-
2.	Strata 1		4 Orang	12 Orang	20 Orang	36 Orang
3.	Diploma III		-	-	1 Orang	-
4.	SMA – Sederajat	-	-	-	5 Orang	5 Orang
5.	SMP – Sederajat	-	-	-	-	-
Jumlah		1 Orang	3 Orang	7 Orang	22 Orang	33 Orang

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepangkatan dan Golongan Ruang

No	Jenjang Kepangkatan	Kedudukan				Jumlah
		Esselon II	Esselon III	Esselon IV	Staf	
1	Pembina Utama Muda IV/c	-	-	-	-	-
2	Pembina Tk. I – IV/b	-1 orang	1 orang	-	-	2 orang
3	Penata – IV/a	-	3 orang			3 orang
4	Penata Tk. I – III/d	-		2 orang	5 orang	7 orang
5	Penata III/c	-	1 orang		1 orang	2 orang
6	Penata Muda Tk. I – III/b	-	-	-	2 orang	2 orang
7	Penata Muda III/a	-	-	-	2 orang	2 orang
8	Pengatur Tk. I – II/d	-	-	-	1 orang	1 orang
10	Pengatur Muda Tk. I – II/c	-	-	-	1 orang	1 orang
11	Penyuluh Sosial Ahli Pertama/IX				1 orang	1 orang
12	Penggerak Swadaya Masyarakat/IX				1 orang	1 orang
13	Arsiparis ahli Pertama/IX				1 orang	1 orang
14	Perencana Ahli Pertama/IX				1 orang	1 orang
15	Penata Layanan Operasional/IX				2 orang	2 orang
16	Pengelola Layanan Operasional/VII				1 orang	1 orang
17	Operator Layanan Operasional				2 orang	2 orang
Jumlah		1 Orang	5 Orang	2 Orang	21 Orang	28 Orang

Jumlah pegawai yang di kontrak kerjakan/Honorer pada Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah per 31 Desember 2024 sebanyak : 10 orang,dengan rincian : 2 orang yang terdata dalam data base/K2 dan 7 orang yang belum termasuk dalam data base K2.

2.2). Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Maluku Tengah meliputi :

a. Bangunan

Bangunan yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah per-31 Desember 2025 sebanyak 8 Unit dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 4. Jumlah Bangunan

No	Uraian	Jumlah
1.	Gedung Kantor Masohi Jl. Buano	1 Unit
2.	Gedung LBK Amahai	3 Unit
3.	Gedung Sekretariat TMP Masohi	1 Unit
4.	Gudang dan Garasi	1 Unit
5.	Gedung Persemayam Mayat	1 Unit
6.	Gedung Pos jaga	1 Unit
Jumlah		8 Unit

b. Inventaris dan Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan Kantor yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah per 31 Desember 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel. 5.

No	Jenis	Merk / Type	Tahun Perolehan	Unit	Kondisi Barang	Analisis Kondisi Barang sesuai Kondisi analisis			
						Lengkap	Kurang	Mencukupi	Lainnya
1.	Filing Kabinet		2013	1	Baik		V		
2.	Laptop	Thosiba	2013	1	Baik		V		
3.	Mesin Potong Rumput	Tanaka	2013	2	Baik			V	
4.	Handy Cam	Sony	2013	1	Baik	V			
5.	Komputer PC	Accer	2013	3	Baik	V			
6.	Kamera Digital	Canon	2013	1	Baik	V			
7.	Rak Buku TV/Kembang		2013	2	Baik		V		
8.	Lampu Hias	Philips	2013	24	Baik	V			Kondisinya sudah rusak sebagian
9.	AC	LG Standar	2014	1	Baik		V		
10.	Laptop	Accer Aspire	2014	4	Baik	V			
11.	Kursi Kerja Eselon III & IV	MI 08	2014	13	Baik		V		Kondisinya sdh rusak
12.	Kursi Kerja Eselon II	EC 027	2014	1	Baik	V			
13.	Kamera Digital	Canon A 2500	2014	5	Baik	V			
14.	Infocus	Infocus IN 124	2014	1	Baik	V			
15.	Warles	Krezt	2014	1	Baik	V			
16.	Kendaraan Operasional Dinas	Yamaha Yupiter Z CW FI	2015	5	Baik		V		
17.	Komputer	Built Up A love 13	2016	1	Baik		V		
18.	Laptop	Thosiba Satelit L50-B214 BX	2016	1	Baik		V		
19.	Note Book	Thosiba Satelit L15-B1330	2016	1	Baik	V			
20.	Printer	Canon IP 2770	2016	5	Baik	V			
21.	Laptop	Thosiba	2017	1	Baik	V			
22.	Printer	Epson	2017	1	Baik	V			
23.	Komputer	Leanova	2017	1	Baik	V			
24.	Komputer	Leanovo	2018	1	Baik	V			
25.	Lap Top	Accer	2018	2	Baik	V			
26.	Notebook	Accer	2018	1	Baik	V			
27.	Printer L 805	Epson	2018	1	Baik	V			
28.	Printer Hp Laser	Laser jet pro 452 aw	2018	1	Baik	V			

29	Infocus	Benqi	2018	1	Baik	V			
30	Lemari Buku	Local	2018	1	Baik	V			
31	Papan pengumuman	Local	2018	1	Baik	V			
32	Kursi Tamu	Local	2018	1	Baik	V			
33	Kursi Tamu Pejabat Eseln II		2018	1 set					
34	Kursi eselon II		2018	1 unit	Baik	V			
35	Kursi eselon III		2018	2 Unit	Baik	V			
36	Meja eselon III		2018	1 Unit					
37	Kursi eselon IV		2018	3 buah	Baik	V			
38	Filing cabinet kayu	Local	2018	1 buah	Baik	V			
39	Mesin potong rumput		2018	1 unit	Baik	V			
40	Mesin semprot rumput		2018	1 unit	Baik	V			
41	Meja Front Office	Local	2019	1 unit	Baik	V			
42	Kretif Wearless Spieker		2019	1 unit	Baik	V			
43	Filling Kabinet file 4 laci	Local	2019	1 unit	Baik	V			
44	Spieker Computer	Logitech	2019	1 bh	Baik	V			
45	Kursi Lipat	Poniks	2019	6 bh	Baik	V			
46	Air Conditioner (AC)	Sharf 1 PK	2019	1 unit	Baik	V			
47	Jam Dinding	Quartz	2019	2 bh	Baik	V			
48	Kain Bendera Hias (Pengukur waktu)	Lokal	2019	56 meter	Baik	V			
49	Laptop	Leanovo	2020	1 unit	Baik	V			
50	Computer	Dell	2020	1 unit	baik	V			
51	Hardisk eksternal	Backup plus Slim	2020	2 unit	Baik	V			
52	Laptop	Azus	2021	2 unit	Baik	V			
53	AC	Samsung	2021	3 unit	Baik	V			
54	Printer	Epson L 120	2021	1 unit	Baik	V			
55	Hardisk	Expansion 1 tera	2022	2 unit	Baik	V			
56	AC	Samsung 1 PK	2022	3 unit	Baik	V			
57	Printer	Canon 3570	2022	3 unit	Baik	V			
58	Laptop	Azus	2022	4 unit	Baik	V			
59	Meja Kerja	Setengah Biro	2023	2 Unit	Baik	V			
60	Printer	Epson 3210	2023	2 Unit	Baik	V			
Jumlah				128 unit					

c. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah per 31 Desember 2025 terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan roda empat dan kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 11 unit dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6. Jumlah Kendaraan Dinas

No	Jenis	Merk / Type	Tahun Perolehan	Unit	Kondisi Barang	Analisis Kondisi Barang sesuai Kondisi analisis			
						Lengkap	Kurang	Mencukupi	Lainnya
1.	Mobil	Avanza	2006	1	Baik		V		Rusak
2.	Sepeda Motor	Shogun	2007	2	Baik		V		Kondisinya sdh rusak
3	Sepeda Motor	Yamaha MX	2008	1	Baik	V			
4.	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2009	1	Baik	V			
5.	Sepeda Motor	Yamaha Z1	2015	5	Baik	V			
6.	Sepeda Motor	Matic 125 cc	2018	1	Baik	V			
7.	Sepeda Motor	Honda	2018	1	Baik	V			
Jumlah				12	Unit				

1.3. Penentuan Isu-isu Strategis.

Permasalahan sosial di Kabupaten Maluku Tengah harus diatasi secara bersama, terpadu dan komprehensif antara semua pihak baik Pemerintah, masyarakat, LSM, swasta terutama dalam mendukung penyelenggaraan program pengentasan kemiskinan, meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penyelenggaraan jaminan social, dimana hal ini dikemas sebagai isu-isu strategis pada Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah antara lain :

- Belum valid dan akurat data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- Masih tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

1.4. Permasalahan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah, maka dalam menjalankan TUPOKSnya Dinas Sosial menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Tata Kelola Pemerintahan belum dilaksanakan secara baik dan optimal;
- Tingginya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- Belum Valid dan Akurat Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- Kurangnya Ketangguhan dan kesiap siagaan Penanggulangan Bencana;
- Kurangnya dukungan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan masalah kesejahteraan social;

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan laporan Kinerja Dinas Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja , pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah adalah merupakan dokumen perencanaan yang sangat penting dan strategis yang disusun melalui proses secara sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati Maluku Tengah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki di Kabupaten Maluku Tengah.

Rencana Strategi Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah di susun selama periode 5 Tahun dari Tahun 2023-2026. Rencana Strategi Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah dimaksudkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Maluku Tengah dan Wakil Bupati terpilih dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026.

Penyusunan Rencana Strategi Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah di lakukan melalui tahapan-tahapan yang sistematis dan terencana dengan proses penyusunan Renstra merujuk pada RPJMD Kabupaten Maluku Tengah dengan melibatkan stakeholder pada saat melakukan muasyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah merupakan hasil kesepakatan bersama dengan stakeholder dengan pemangku kepentingan lainnya.

Selanjutnya RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah di jabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RENJA) yang merupakan Dokumen perencanaan untuk periode 1 Tahun. RENJA Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah memuat Rencana program dan Kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan di tahun yang akan datang.

2.1.1. TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan

- Mewujudkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kuat dan mandiri.
- Mewujudkan ketahanan Masyarakat terhadap bencana .
- Meningkatkan tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih dan professional

b. Sasaran

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
- b. Tertanganinya Masyarakat korban bencana alam dan bencana sosial.

- c. Terwujudnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kuat dan mandiri

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam Rangka mencapai Sasaran yang telah ditetapkan , maka Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah menetapkan Indikator Utama sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Formula/Rumus perhitungan	Target		Penanggung jawab
				Satuan	2025	
1.	Terwujudnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kuat dan mandiri	1. Persentase Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial yang seharusnya dilaksanakan}} \times 100$	%	75	Bidang Linjamsos, bidang PFM, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Sekretariat
		2. Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	$\frac{\text{Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan}}{\text{Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada}} \times 100$	%	31	Bidang Pemberdayaan Sosial
2.	Tertanganinya Masyarakat Korban Bencana alam dan bencana sosial	1. Persentase Korban Bencana yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang tertangani}}{\text{Jumlah korban bencana yang ada}} \times 100$	%	90	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

2.3 Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan Komitmen Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah untuk mewujudkan pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan serta Indikator Kinerja , melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah Komitmen penerima Amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur bidang sosial berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dengan bertolak pada uraian di atas dan sesuai DPA Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 maka di tetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3 .

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	
			Satuan	2025
1	Terwujudnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kuat dan mandiri	1. Persentase Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	75
		2. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan.	%	31
2.	Tertanganinya Masyarakat Korban Bencana alam dan bencana sosial	1. Persentase Korban Bencana yang tertangani	%	90
3.	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik.	1. Nilai Sakip	Nilai	A

Dari tabel diatas menggambarkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2025.

Target Indikator Kinerja ini disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah yang juga diselaraskan dengan program prioritas Kabupaten Maluku Tengah dan Provinsi Maluku. Berkaitan dengan Indikator Nilai Sakip dengan target Nilai A, hal ini disesuaikan dengan target Nilai Sakip Pemerintah Daerah pada Tahun 2025

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Sosial

Untuk menjawab Indikator Kinerja tersebut diatas maka, diimplementasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

1.1.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

1.2. Adminstrasi Keuangan perangkat daerah

1.2.1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

1.2.2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

1.3. Adminstrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.3.2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.3.3. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.3.4. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

1.4. Pengadaan Barang milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah

1.4.1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

1.5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah

1.5.1. Penyediaan jasa surat menyurat

- 1.5.2. Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik;
- 1.5.3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
- 1.6. Pemeliharaan barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah.**
- 1.6.1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
- 1.6.2. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor;
- 2. Program Pemberdayaan Sosial**
- 2.1 . Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**
- 2.1.1. Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
- 2.3. Pengembangan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**
- 2.3.1. Peningkatan kemampuan potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan Kabupaten/Kota;
- 2.3.2. Peningkatan kemampuan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota;
- 3. Program Rehabilitasi Sosial**
- 3.1. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti.**
- 3.1.1. Penyediaan permakanan
- 3.1.2. Penyediaan Alat Bantu
- 3.1.3. Pemberian Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
- 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**
- 4.1. Pengelolaan data Fakir Msikin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**
- 4.1.1. Pengelolaan data Fakir Msikin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 4.1.2. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- 4.1.3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi masyarakat
- 5. Program Penanganan Bencana**
- 5.1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial**
- 5.1.1. Penyediaan makanan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum, Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Pada tahun 2025 ada 3 (tiga) sasaran dan kesemuanya belum mencapai kinerja yang diharapkan. Kriteria keberhasilan pencapaian sasaran jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan yaitu 100%. Idealnya, capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat *outcome*. Keberhasilan pencapaian sasaran terhadap indikator Kinerja Utama masih belum optimal namun dapat ditingkatkan setiap tahunnya.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI TAHUN 2024

Capaian kinerja Organisasi dimaksudkan dalam rangka mengukur kinerja organisasi sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 Tahun, dari 1 Januari s.d 31 Desember Tahun 2025 dan pengukuran kinerja 5 Tahun sebelumnya sebagai pembandingan capaian indikator kinerja yang telah dilakukan Untuk mendukung sasaran strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah periode Tahun 2023 - 2026, penjabarannya kedalam Rencana kinerja (Renja) tahun 2025 mencakup pelaksanaan 5 program, 11 kegiatan dan 24 sub kegiatan.

Tabel: 3.1

Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025

Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
Mewujudkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kuat dan mandiri.	1. Persentase Layanan Kesejahteraan Sosial	70	71	101
Mewujudkan Ketahanan Masyarakat terhadap bencana	1. Persentase Penanganan Bencana	90	90	100

Dari tabel diatas tergambar Bahwa Indikator Kinerja Tujuan Persentase layanan Kesejahteraan sosial yang ditargetkan 70 %, terealisasi sebanyak 71 % dengan Capaian Kinerja melebihi target yang ditetapkan sebanyak 101 %. Hal ini merupakan sebuah keberhasilan yang perlu dipertahankan ditahun-tahun mendatang. Sedangkan Indikator Kinerja Tujuan Persentase Penanganan Bencana yang ditargetkan 90 %, terealisasi sebanyak 90 % dengan capaian Kinerja 100 %.

Tabel: 3.2**Target dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis Tahun 2025**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Terwujudnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kuat dan mandiri.	1. Persentase Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	75	84	112
	2. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan.	30	30,27	100,9
Tertanganinya Masyarakat Korban Bencana alam dan bencana sosial	1. Persentase Korban Bencana yang tertangani	90	90	100
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP	80	75,45	94

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah (data diolah)

Dari tabel diatas menggambarkan target kinerja pada Indikator Kinerja Dinas Sosial Persentase pelayanan dan Jaminan Sosial, Indikator Kinerja Persentase Korban Bencana yang tertangani telah memenuhi target capaian yang ingin dicapai pada Tahun 2025, sedangkan untuk Target Kinerja pada Indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan dan Indikator Kinerja Nilai Sakip belum memenuhi target capaian yang ingin dicapai.

3.1.2 MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR.

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3.3.**Perbandingan realisasi Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2023, 2024 dan 2025**

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023 - 2025			
		CAPAIAN 2023 (%)	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2025	RATA-RATA
1	Persentase Layanan Kesejahteraan Sosial	80	90	71	80,33
2	Persentase Penanganan bencana	70	80	90	80

Sumber Data Realisasi Bantuan diolah

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa terjadi peningkatan Persentase Capaian Kinerja Tujuan pada di Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025, hal ini perlu dipertahankan atau ditingkatkan pada Tahun-tahun mendatang.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Tahun 2023, 2024 dan 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023-2025			
		REALISASI 2023 (%)	REALISASI 2024 (%)	REALISASI 2025 (%)	RATA-RATA (%)
1	Persentase Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	73	76	84	77,66
	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	28	28	30,27	28,75
2	Persentase Korban Bencana yang tertangani	76	80	80	78,66

Sumber Data : Dinas Sosial (Realisasi Bantuan diolah)

Dari tabel diatas tergambar bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang dipakai pada tahun 2025 dalam dokumen RENSTRA Dinas Sosial tahun 2023-2026 tidak terdapat dokumen RENSTRA tahun sebelumnya , hal ini dikarenakan perubahan Tujuan, Sasaran dan indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial yang tertuang dalam Rencana Staregis.

3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2025 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERANCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Tabel 3.5
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Tahun 2025 (%)	Target Akhir RENSTRA 2026 (%)	Tingkat Kemajuan (%)
Mewujudkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kuat dan mandiri.	1. Persentase Layanan Kesejahteraan Sosial	76	71	70	174
Mewujudkan Ketahanan Masyarakat terhadap bencana	1. Persentase Penanganan Bencana	80	90	90	190

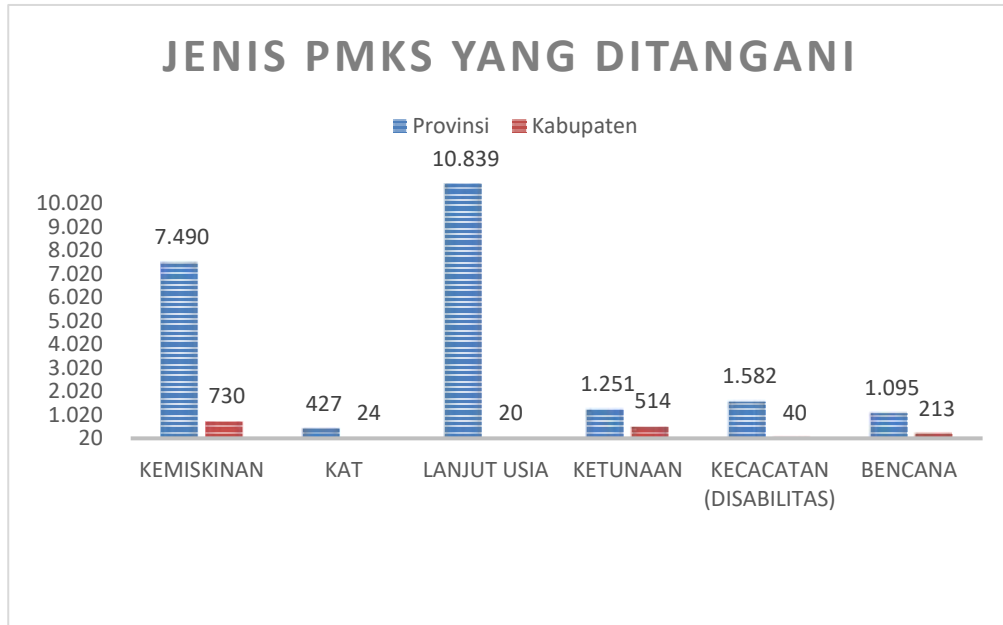
Dari tabel diatas tingkat kemajuan untuk capaian sasaran strategis meningkat dengan capaian rata-rata di atas 100%.

3.1.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN STANDAR NASIONAL/PROVINSI

1.1. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN CAPAIAN KINERJA INSTANSI LAINNYA

TABEL. 3.6

Perbandingan Capaian Kinerja dengan capaian Kinerja Dinas Sosial Propinsi Maluku Tahun 2025



Laporan Kinerja Dinas Sosial Provinsi Maluku

Berdasarkan tabel diatas perbandingan antara Realisasi Capaian Indikator Kinerja Persentase PMKS yang tertangani pada Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah dengan Realisasi Capaian Indikator Persentase PMKS Dinas Sosial Provinsi Maluku yang mana capaian indikator ini realisasinya masi dibawah target yang ingin dicapai yaitu 100% yang mana hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu di antaranya sarana dan prasarana yang tidak memadai, terjadinya repocusing anggaran yang berdampak pada pencapaian indikator. Hal ini perlu menjadi bahan evaluasi dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang dan diharapkan dukungan yang lebih baik oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berupa penyediaan dana sharing untuk lebih meningkatkan capaian indikator ini.

3.1.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN /PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Adapun penunjang Keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja yaitu :

1. Faktor penghambat atau permasalahan yang dihadapi :
 - Validitas data pemerlu layanan kesejahteraan sosial.
 - Belum maksimalnya SDM pendukung dalam hal penanganan PMKS
 - Anggaran belum maksimal
2. Faktor keberhasilan
 - Sarana dan prasarana yang memadai
 - Maksimalnya Kerjasama dengan stake holder terkait.
3. Alternatif atau solusi yang dilakukan
 - Updating data Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial.
 - Meningkatkan Kerjasama dengan stake holder terkait
 - Mengpotimalisasi kemampuan SDM pendukung dalam hal PMKS

3.1.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Salah satu hal yang perlu dilakukan dalam pelaporan kinerja adalah penggunaan sumber daya, efesiensi dilakukan berkaitan dengan sejauhmana organisasi telah mencapai tingkat produktifitas secara optimal atas dasar sumber daya yang telah digunakan. tingkat efesiensi sumber daya pada Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel: 3.7

Efesiensi Penggunaan Sumber daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Tingkat capaian (%)
Terwujudnya Penyanggand Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kuat dan mandiri.	1. Persentase Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	75	84	112
	2. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	30	30,27	100,9
Tertanganinya Masyarakat Korban Bencana alam dan bencana sosial	1. Persentase Korban Bencana yang tertangani	80	80	100
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik.	1. Nilai Sakip	80	75,45	94,32

sumber data diolah Dinas Sosial

Dari sudut pandang efektifitas, maka kinerja pencapaian sasaran Dinas Sosial terhadap penggunaan sumber daya dapat dikategorikan belum efisien, hal ini terlihat pada capaian yang meningkat di atas 100 % walaupun terdapat 2 indikator yang belum tercapai 100 % yakni pada indikator PMKS yang persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan dikarenakan adanya efisiensi anggaran sedangkan untuk nilai SAKIP Dinas Sosial hanya mendapatkan BB dikarenakan adanya beberapa dokumen yang tidak dapat ditampilkan.

3.1.7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

Untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian target kinerja tahun 2025 disajikan pada tabel dibawah ini :

TABEL 3.1.7
Analisis Program Kegiatan Yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA POGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (%)
1	2	3	5	6	7
MEWUJUDKAN PENYANDANG PMKS YANG KUAT, MANDIRI, KREATIF DAN INOVATIF		Persentase Layanan Kesejahteraan Sosial			70
	TERWUJUDNYA PMKS YANG KUAT DAN MANDIRI	Persentase Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial			75
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PMKS YANG TERTANGANI	39
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti	Jumlah PMKS Terlantar diluar panti yang terfasilitasi	418 Orang
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi	96 Orang

			Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		
			Penyediaan Alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang
			Pembelian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	310 Orang
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE PMKS SKALA KABUPATEN YANG MENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR	61
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pengelolaan Data Fakir Miskin	3 Layanan
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan bantuan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	11.000 Keluarga
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	1.000 Keluarga
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	325 Orang

MEWUJUDKAN KETAHANAN MASYARAKAT TERHADAP BENCANA	TERTANGANINYA MASYARAKAT KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL	Persentase Potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakann		30
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE PMKS YANG MEMPEROLEH BANTUAN SOSIAL	37
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah PSKS yang difasilitasi	18 Orang
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang
				90
				80
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE KORBAN BENCANA YANG MENERIMA BANTUAN SOSIAL SELAMA TANGGAP DARURAT	90
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam/Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang tertangani	468 Orang
		Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 Hari dalam masa Tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan kabupaten/ Kota	333 Orang

MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH		NILAI SAKIP	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kabupaten/kota	135 Orang
					BB
	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	NILAI SAKIP			BB
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PERANGKAT DAERAH	64
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	2 Dokumen
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
			Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah Aparatur yang menerima Gaji, Tunjangan dan Penghasilan Lainnya	29 Orang
			Penyediaan gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang tersedia	4 Layanan

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	9 Paket
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
			Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik daerah yang disediakan	5 Jenis
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	13 Unit
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang tersedia	3 Layanan
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	2 Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik Daerah yang terpelihara	4 Unit
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas	2 Unit

			perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit

Dari seluruh rangkaian Program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025 yang menunjang keberhasilan Dinas Sosial dalam pencapaian Target kinerja Tujuan, Sasaran maupun indikator kinerja, terdapat beberapa catatan penting yang berkaitan dengan pencapaian Nilai Sakip Dinas Sosial pada Tahun 2025. Bagian terpenting yang menjadi bahan Evaluasi dan perbaikan pada Tahun mendatang adalah berkaitan dengan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Dinas Sosial yang belum berjalan dengan maksimal.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan Tahun 2025 yang dicapai dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2025.

Anggaran yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2025, bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 6.986.959.000,- dengan rincian sebagai berikut :

-	Belanja Operasi	: 3.445.784.860	dengan rincian sbb :
	a. Belanja Pegawai	: 2.086.732.860	
	b. Belanja barang dan Jasa	: 1.234.552.000	
	c. Belanja Bantuan Sosial	: 124.500.000	
-	Belanja Modal	: 48.635.000	
	Jumlah	: 3.494.419.860	

Dari total anggaran sebesar Rp. 3.494.419.860,- telah direalisasikan sebesar Rp.4.889.283.305,- atau 64 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	2.086.732.860	2.045.976.147	98
2.	Belanja Barang dan jasa	1.234.552.000	1.197.188.626	97
3.	Belanja Bantuan Sosial	124.500.000	124.500.000	100
4.	Belanja Modal	48.635.000	46.877.000	96
	Jumlah	3.494.419.860	3.414.541.773	98

Rincian selengkapnya atas masing-masing belanja, sebagai berikut :

1. Belanja Operasi dan belanja modal

Belanja operasi dan belanja modal dialokasikan untuk membiayai 5 program, 11 kegiatan dan 24 sub kegiatan.

Perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam tahun anggaran 2025 sebagai berikut

Tabel 3.3.2
Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Operasional

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Vol	Satuan	Anggaran (Rp)	Vol	Satuan	Realisasi (Rp)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BB	Kualifikasi	2.693.719.860	BB	Kualifikasi	2.616.455.773	97
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Instansi Pemerintah	2	Dokumen	10.885.000	2	Dokumen	10.885.000	100
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	10.885.000	1	Dokumen	10.885.000	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29	Org	2.289.232.860	29	Org	2.234.476.147	96
2.1.	Penyediaan Gajin dan Tunjangan ASN	29	Org	2.086.732.860	29	Org	2.045.976.147	98
2.2.	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	Dokumen	202.500.000	1	Dokumen	188.500.000	94
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	Layanan	248.838.000	4	Layanan	248.663.000	99
3.1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	3	Jenis	4.411.000	3	Jenis	4.411.000	100
3.2.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3	Jenis	5.527.000	3	Jenis	5.527.000	100
3.3.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2	Dokumen	5.300.000	2	Dokumen	5.300.000	100
3.4.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	Laporan	233.600.000	1	Laporan	233.425.000	99
4	Pengadaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pmerintahan Daerah	3	Jenis	48.635.000	3	Jenis	48.635.000	96
4.1.	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	13	Unit	48.635.000	13	Unit	46.877.000	96
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Layanan	63.650.000	3	Layanan	47.075.626	74
5.1.	Penyediaan jasa surat menyurat	2	Jenis	2.990.000	2	Jenis	2.990.000	100
5.2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2	Laporan	41.160.000	2	Laporan	24.585.626	60
5.3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4	Laporan	19.500.000	4	Laporan	19.500.000	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Unit	32.479.000	4	Unit	24.479.000	89
6.1	Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas /kendaraan dinas jabatan	2	Unit	21.095.000	2	Unit	17.095.000	81
6.3	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2	Unit	11.384.000	2	Unit	11.384.000	100
II	Program Pemberdayaan Sosial	37	%	18.000.000	37	%	18.000.000	100

2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	18	Orang	18.000.000	18	Orang	18.000.000	100
2.1	Peningkatan kemampuan potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan Kabupaten/Kota	18	Orang	18.000.000	18	Orang	18.000.000	100
III	Program Rehabilitasi Sosial	39	%	214.089.000	39	%	214.089.000	100
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar Panti Sosial	418	Orang	214.089.000	418	Orang	214.089.000	100
1.1	Penyediaan Permakanan	96	Orang	61.590.000	96	Orang	61.590.000	100
1.2	Penyediaan Alat Bantu	12	Orang	23.170.000	12	Orang	23.170.000	100
1.3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	310	Orang	129.329.000	310	Orang	129.329.000	
IV	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	61	%	391.192.000	61	%	390.983.000	99
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3	Layanan	391.192.000	3	Layanan	390.983.000	99
1.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	11.000	Keluarga	70.041.000	11.000	Keluarga	70.041.000	100
1.2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1000	Keluarga	59.875.000	1000	Keluarga	59.706.000	99
1.3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	325	Org	261.276.000	325	Org	261.236.000	99
V	Program Penanggulangan Bencana	90	%	177.419.000	90	%	175.014.000	99
1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	468	Orang	177.419.000	468	Orang	175.014.000	99
	Penyediaan Makanan	333	Orang	101.951.000	333	Orang	101.571.000	100
	Penyediaan Sandang	135	Orang	75.468.000	135	Orang	73.468.000	98
Jumlah				3.494.419.860			3.414.541.773	98

Dari total jumlah kegiatan sebanyak 11 dan sub kegiatan sebanyak 22 kegiatan sebagaimana tabel diatas, terdapat 3 (tiga) kegiatan dan 3 sub kegiatan yang realisasi anggaran di bawah 100%. Sedangkan 8 (delapan) kegiatan dan 19 sub kegiatan realisasi anggaran 100 %, hal ini menunjukkan bahwa realisasi Anggaran tidak maksimal yang dipengaruhi oleh Realisasi Belanja Bantuan Sosial yang telah direncanakan namun tidak terealisasi.

BAB IV

PENUTUP

Permasalahan utama Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk menekan laju pertumbuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), adalah sulitnya mencari lapangan pekerjaan, masih banyak warga masyarakat yang kategori miskin/ kurang mampu dan rentan, akurasi data PMKS, adanya bencana di samping persoalan sosial lainnya. Hal inilah yang berdampak pada munculnya permasalahan-permasalahan sosial seperti : kemiskinan, kekerasan, keterlantaran, dan konflik sosial.

Secara umum, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2025 sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, telah berhasil apabila dikaitkan dengan tujuan dan sasaran tahunan yang telah ditetapkan walaupun pada kenyatannya masih ada yang belum dapat untuk dicapai, dengan demikian sangat diharapkan target yang telah ditetapkan bisa tercapai dengan melakukan langkah-langkah inovatif dan kreatif serta melakukan evaluasi dan penilaian serta identifikasi atas hambatan dan permasalahan yang mempengaruhi pencapaian suatu indikator.

Demikian LKjIP ini di susun sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 sekaligus pengukuran kinerja keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial serta sebagai bahan evaluasi atas kegagalan/ ketidakberhasilan pencapaian target kinerja yang belum dicapai secara maksimal.

Masohi, Januari 2026


Pit. Kepala Dinas
Ruslan Y. Wailissa
Ruslan Y. Wailissa, S. Pi, M. Si
NIP. 19750727 200003 1 005